



JALANAN, KAMPUS, DAN PARLEMEN: TIGA ARENA POLITIK INDONESIA HARI INI

SUARA RAKYAT • GAGASAN KRITIS • KEBIJAKAN NEGARA



JALANAN

RUANG ASPIRASI, PERLAWANAN,
DAN TEKANAN PUBLIK

KAMPUS

PUSAT ILMU, KRITIK, DAN PERUBAHAN

PARLEMEN

TEMPAT KEBIJAKAN DIBENTUK,
DIAWASI, DAN DIPERTARUHKAN



PARTISIPASI
PUBLIK



KEBEBASAN
SIPIL



PENDIDIKAN
KRITIS



LEGISLASI
DAN KEBIJAKAN



PENGAWASAN
DAN AKUNTABILITAS



DIALOG DAN
DEMOKRASI

Oleh:

Rudy C Tarumingkeng

MEMBANGUN DEMOKRASI YANG HIDUP, TERBUKA, DAN BERKEADILAN

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

6 April 2026

JALANAN, KAMPUS, DAN PARLEMEN: TIGA ARENA POLITIK INDONESIA HARI INI

Abstrak

Makalah ini membahas tiga arena utama politik Indonesia kontemporer—jalan, kampus, dan parlemen—sebagai ruang yang saling berinteraksi dalam membentuk arah demokrasi, konflik kebijakan, dan legitimasi kekuasaan. Argumen utama makalah ini adalah bahwa politik Indonesia hari ini tidak dapat dipahami hanya dari keputusan formal negara di parlemen, karena dinamika kekuasaan juga diproduksi, diuji, dan dipertentangkan di ruang protes jalan serta di lingkungan kampus sebagai pusat kritik moral, produksi gagasan, dan mobilisasi generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tetap menunjukkan partisipasi politik yang tinggi, tetapi pada saat yang sama menghadapi penurunan pada beberapa indikator seperti efektivitas parlemen, independensi peradilan, dan kepastian penegakan hukum. Dalam konteks seperti itu, jalan menjadi arena tekanan langsung, kampus menjadi arena artikulasi gagasan dan kaderisasi oposisi demokratis, sementara parlemen menjadi arena formalisasi sekaligus penyempitan konflik. Melalui pembacaan atas protes pemilu dan pilkada 2024, gerakan “Indonesia Gelap” 2025, revisi UU TNI 2025, serta gelombang protes terhadap tunjangan legislator pada 2025 dan putusan pengadilan 2026 yang membebaskan aktivis yang dituduh menghasut protes, makalah ini menunjukkan bahwa relasi antara ketiga arena itu bersifat dinamis. Kadang jalan berhasil memaksa parlemen mundur, kadang kampus memberi legitimasi moral pada protes, tetapi kadang pula parlemen tetap menang

karena dukungan koalisi besar dan kontrol prosedural. Oleh sebab itu, masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh apakah hubungan antara tiga arena ini berkembang ke arah dialog yang lebih terbuka dan akuntabel, atau justru menuju polarisasi, represi, dan penyempitan ruang sipil. ([International IDEA](#))

Kata kunci: *jalanan, kampus, parlemen, demokrasi Indonesia, gerakan mahasiswa, protes publik, politik kontemporer*

Jalanan, Kampus, dan Parlemen: Tiga Arena Politik Indonesia Hari Ini

Pendahuluan

Politik Indonesia hari ini bergerak dalam lanskap yang tidak lagi cukup dibaca melalui pemilu dan institusi formal saja. International IDEA menilai Indonesia berkinerja menengah dalam representasi, hak, dan *rule of law*, tetapi tinggi dalam partisipasi; pada saat yang sama, dibanding lima tahun sebelumnya, Indonesia mengalami penurunan pada akses keadilan, pemilu yang kredibel, efektivitas parlemen, independensi peradilan, dan kepastian penegakan hukum. Freedom House juga tetap menempatkan Indonesia dalam kategori *Partly Free* dengan skor 56 dari 100. Dengan demikian, Indonesia masih partisipatif, tetapi kualitas institusional yang mengolah partisipasi itu sedang teruji. ([International IDEA](#))

Dalam situasi seperti itu, politik tidak berhenti di gedung parlemen. Ia berpindah ke jalanan saat warga merasa prosedur formal tidak lagi cukup mewakili kepentingan mereka. Ia juga tumbuh di kampus, ketika mahasiswa dan akademisi mengartikulasikan kritik moral terhadap negara dan memobilisasi solidaritas antargenerasi. Sementara itu, parlemen tetap

menjadi arena kunci karena di situlah tuntutan dipadatkan menjadi undang-undang, anggaran, dan keputusan politik yang mengikat. Maka, memahami Indonesia hari ini berarti memahami hubungan timbal balik antara tekanan jalan, produksi wacana kampus, dan kalkulasi kekuasaan di parlemen. ([DPR RI](#))

Secara konstitusional, ruang bagi politik di luar negara sebenarnya jelas. UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai hak asasi yang dijamin negara. Artinya, demonstrasi, mimbar akademik, pernyataan sikap kampus, petisi, dan tekanan publik bukanlah gangguan eksternal terhadap demokrasi, melainkan bagian dari tata demokrasi itu sendiri. Namun dalam praktik, ruang sipil Indonesia tetap berada dalam tekanan; CIVICUS pada 2025 menilai ruang sipil Indonesia berstatus "obstructed", yang berarti kebebasan berekspresi, berkumpul damai, dan berserikat menghadapi hambatan serius. ([BPHN](#))

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa jalan, kampus, dan parlemen adalah tiga arena yang tidak berdiri sendiri. Jalan memberi tekanan dan urgensi. Kampus memberi bahasa moral, kader, jaringan, dan legitimasi intelektual. Parlemen memberi bentuk hukum dan keputusan final, tetapi juga kerap menjadi arena yang memadatkan aspirasi secara sempit. Di Indonesia kontemporer, ketiga arena itu saling memasok energi dan sekaligus saling membatasi. Ketika ketiganya berinteraksi secara sehat, demokrasi menjadi hidup. Ketika satu arena mendominasi dan menutup yang lain, demokrasi menjadi prosedural tetapi rapuh. ([International IDEA](#))

Kerangka Konseptual: Tiga Arena Politik

Jalan dalam ilmu politik dapat dipahami sebagai arena tekanan langsung, cepat, dan simbolik. Ia berbeda dari parlemen karena tidak bekerja terutama melalui aturan prosedural, melainkan melalui visibilitas, emosi publik, dan pembentukan biaya politik. Protes jalan efektif ketika

ia mengubah isu teknis menjadi krisis legitimasi. Reuters mencatat bahwa pada Agustus 2024, parlemen Indonesia akhirnya menangguhkan rencana revisi aturan pemilu daerah setelah demonstrasi besar meledak di Jakarta dan kota-kota lain. Peristiwa itu menunjukkan bahwa dalam demokrasi yang prosedurnya dapat dibelokkan, jalan sering menjadi mekanisme koreksi yang paling cepat. ([Reuters](#))

Kampus adalah arena yang lebih kompleks. Ia bukan hanya lokasi fisik mahasiswa berkumpul, melainkan ruang sosial tempat kritik, wacana, identitas politik, dan etos oposisional diproduksi. Studi Ramadhan dan Aminuddin pada 2025, berdasarkan survei terhadap 497 mahasiswa dari 26 universitas, menunjukkan bahwa aktivisme mahasiswa Indonesia pasca-otoritarian berlangsung melalui media sosial, partisipasi organisasi, diskursus publik, dan demonstrasi jalan; studi itu juga menegaskan bahwa aliansi strategis antara kelompok kampus dan aktor masyarakat sipil eksternal makin penting dalam gerakan kontemporer. Artinya, kampus hari ini bukan ruang steril dari politik, tetapi salah satu mesin utama yang menghubungkan ide, organisasi, dan aksi. ([Jurnal Universitas Padjadjaran](#))

Sementara itu, parlemen adalah arena formal dari demokrasi perwakilan. DPR sendiri menegaskan bahwa ia mempunyai tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam teori demokrasi, parlemen seharusnya menjadi tempat konflik sosial diterjemahkan menjadi keputusan yang sah. Akan tetapi, ketika koalisi kekuasaan terlalu dominan dan partisipasi publik hanya formal, parlemen dapat berubah dari arena representasi menjadi arena penguncian keputusan. Maka, relasi antara jalan dan parlemen pada dasarnya adalah relasi antara tekanan langsung dan penyaringan institusional. ([DPR RI](#))

Dalam konteks Indonesia, kampus menempati posisi penghubung. Adhipermana menulis bahwa gerakan mahasiswa Indonesia secara historis diposisikan sebagai "moral force", tetapi doktrin ini juga dapat menjadi batas jika membuat gerakan enggan membangun aliansi politik yang lebih

luas. Pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tetap dapat menjadi pelopor perubahan sosial, terutama dalam situasi krisis. Dengan demikian, kampus tidak cukup dipahami sebagai “penjaga moral” semata, tetapi juga sebagai arena yang terus-menerus bernegosiasi antara idealisme, organisasi, dan efektivitas politik.

Jalanan sebagai Arena Tekanan Publik

Jalanan memiliki kekuatan karena ia mengubah ketidakpuasan menjadi pemandangan politik yang sulit diabaikan. Pada 22 Agustus 2024, demonstrasi besar menolak manuver revisi aturan pilkada berlangsung di Jakarta dan berbagai kota, dan Reuters melaporkan bahwa DPR akhirnya menunda pembahasan setelah protes meluas. Dua hari kemudian, KPU mendapat persetujuan untuk menerbitkan aturan baru yang selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan sejalan dengan tuntutan demonstran. Kasus ini menunjukkan bahwa jalanan masih mampu memaksa negara mengoreksi diri, khususnya ketika isu yang dipersoalkan dianggap menyangkut keadilan prosedural dan integritas demokrasi.

([Reuters](#))

Tetapi jalanan juga menunjukkan keterbatasannya. Kemenangan protes Agustus 2024 tidak menghapus fakta bahwa demonstrasi itu dihadapi dengan gas air mata, *water cannon*, dan penangkapan. Jalanan bisa membuat negara mundur, tetapi tidak otomatis membuat respons aparat menjadi lebih demokratis. Di Indonesia hari ini, ruang jalanan tetap sah secara konstitusional, namun praktis selalu berada dalam bayang-bayang sekuritisasi—yakni kecenderungan membaca mobilisasi warga sebagai soal ketertiban lebih dulu, bukan sebagai ekspresi politik yang sah. ([Reuters](#))

Pola ini berulang pada gelombang protes 2025. Reuters melaporkan bahwa pada Februari 2025 ribuan mahasiswa di berbagai kota turun dalam gerakan “Indonesia Gelap” untuk memprotes pemotongan anggaran dan kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang dinilai mengancam pendidikan dan masa depan mereka. Protes itu berlanjut ke hari-hari

berikutnya dan menjadi simbol keresahan generasi muda atas kombinasi kebijakan ekonomi, peran militer di ranah sipil, dan arah pemerintahan baru. Jalan, dalam hal ini, bukan hanya reaksi spontan, melainkan kanal untuk mengartikulasikan rasa cemas kolektif tentang masa depan republik.

([Reuters](#))

Jalan menjadi lebih menentukan lagi pada Agustus–September 2025, ketika demonstrasi terhadap tunjangan dan fasilitas anggota parlemen berkembang menjadi kerusuhan luas. Reuters melaporkan bahwa protes ini memaksa pemerintah dan partai-partai politik menyetujui pemotongan sejumlah fasilitas legislator, tetapi juga berkembang menjadi kekerasan paling serius dalam beberapa dekade. Laporan Reuters pada Maret 2026 tentang pembebasan empat aktivis menyebut rangkaian protes 2025 itu berakhir dengan 10 kematian dan hampir 7.000 penangkapan. Ini menunjukkan dua hal sekaligus: jalan masih mampu mengguncang negara, tetapi biaya sosial-politiknya bisa sangat tinggi ketika pengelolaan konflik gagal. ([Reuters](#))

Karena itu, jalan di Indonesia kontemporer harus dibaca secara ganda. Ia adalah arena demokratisasi dari bawah, tetapi juga arena di mana negara menguji batas toleransinya terhadap dissent. Jalan dapat memaksa koreksi kebijakan, tetapi dapat pula menjadi titik di mana demokrasi diuji oleh kekerasan, kriminalisasi, dan pembatasan. Semakin tertutup saluran formal, semakin besar kemungkinan jalan menjadi arena penentu.

([Reuters](#))

Kampus sebagai Arena Kritik, Moral Force, dan Kaderisasi Politik

Kampus mempunyai posisi istimewa dalam sejarah politik Indonesia. Reuters mengingatkan pada September 2025 bahwa mahasiswa Indonesia telah lama dipandang sebagai garda depan demokrasi, termasuk dalam protes yang menjatuhkan Soeharto pada 1998. Reputasi historis ini masih hidup sampai sekarang. Pada Februari 2024, Reuters melaporkan demonstrasi mahasiswa yang menuntut presiden tetap netral menjelang

pemilu, sementara tekanan dari akademisi dan kampus-kampus terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan menjadi salah satu gejala paling menonjol menjelang pemilu 2024. Bahkan Wakil Presiden saat itu menyatakan kritik akademisi adalah bagian dari dinamika politik yang harus diperhatikan pemerintah. ([Reuters](#))

Hal ini memperlihatkan bahwa kampus bukan hanya penghasil lulusan, tetapi juga produsen legitimasi dan delegitimasi politik. Ketika dosen, profesor, senat akademik, atau BEM menyatakan sikap, yang dipertaruhkan bukan semata isi kritiknya, tetapi juga bobot moral dari institusi pendidikan itu sendiri. Di Indonesia, pernyataan kampus masih memiliki resonansi tinggi karena ia dianggap relatif lebih otonom dari transaksi politik praktis. Kampus dapat memberi bahasa etis bagi protes yang lahir di jalan, dan pada saat yang sama menyuplai argumen yang dapat masuk ke media dan arena hukum. ([Tempo](#))

Penelitian Ramadhan dan Aminuddin menegaskan bahwa aktivisme mahasiswa kini lebih berlapis dibanding generasi sebelumnya. Aktivisme tidak lagi identik hanya dengan demonstrasi fisik, melainkan juga bercampur dengan diskursus media sosial, partisipasi organisasi, dan aliansi lintas-aktor. Sementara itu, studi Nugroho pada 2025 menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi katalis mobilisasi cepat dan pembentukan identitas kolektif di kalangan anak muda, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada integrasi antara aksi daring dan luring, serta terancam oleh misinformasi, pelecehan, dan kontra-mobilisasi *cyber troops*. Dengan kata lain, kampus hari ini bukan hanya ruang diskusi, tetapi node dalam jaringan aktivisme hibrida. ([Jurnal Universitas Padjadjaran](#))

Meski demikian, kampus juga memiliki keterbatasan. Adhipermana menunjukkan bahwa doktrin "moral force" dapat membuat gerakan mahasiswa berada dalam posisi kabur terhadap kekuasaan: cukup kritis untuk menantang negara, tetapi sering enggan membangun aliansi yang

lebih luas karena takut dianggap terlalu politis. Akibatnya, gerakan mahasiswa besar—seperti #ReformasiDikorupsi 2019 atau protes Omnibus Law 2020—sering berhasil mengangkat isu, tetapi tidak selalu berhasil mengubah hasil politik. Kritik ini masih relevan untuk membaca kampus hari ini: kampus kuat sebagai suara moral, tetapi belum selalu efektif sebagai mesin perubahan institusional.

Pada 2025, fungsi kampus sebagai arena oposisi terlihat jelas dalam “Indonesia Gelap”, protes terhadap revisi UU TNI, dan gelombang protes atas tunjangan legislator. Reuters melaporkan bahwa dalam protes September 2025, badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia menuntut penyelidikan independen atas kekerasan polisi dan secara terbuka mengontraskan tunjangan legislator dengan kesulitan ekonomi warga. Artinya, kampus bukan hanya memobilisasi massa, tetapi juga merumuskan narasi yang menghubungkan keadilan ekonomi, kekerasan aparat, dan krisis representasi parlemen. ([Reuters](#))

Parlemen sebagai Arena Formal Kekuasaan

Secara normatif, parlemen adalah pusat demokrasi perwakilan. DPR menyebut dirinya sebagai pemegang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Secara teoritis, ini berarti parlemen adalah arena tempat aspirasi sosial diterjemahkan menjadi hukum dan kebijakan. Namun masalahnya, dalam politik Indonesia hari ini, kapasitas representatif parlemen sering dipertanyakan karena dominasi koalisi besar, percepatan pembahasan undang-undang, dan kecenderungan menempatkan partisipasi publik sebagai formalitas belaka. International IDEA mencatat bahwa Indonesia mengalami penurunan pada indikator *effective parliament* dibanding lima tahun sebelumnya. ([DPR RI](#))

Ketegangan itu tampak sangat jelas dalam revisi UU TNI pada Maret 2025. Reuters melaporkan bahwa parlemen meloloskan revisi yang membuka lebih banyak jabatan sipil bagi perwira militer aktif, meskipun ratusan mahasiswa dan aktivis berunjuk rasa menolaknya. Kelompok HAM

mengingatkan bahwa revisi ini bisa membawa Indonesia mundur ke masa ketika militer sangat dominan dalam urusan sipil. Namun dari sisi DPR, pernyataan resmi menegaskan bahwa revisi telah dilakukan sesuai mekanisme dan bahwa supremasi sipil tetap dijaga. Di sini terlihat bagaimana parlemen memosisikan dirinya sebagai arena legalitas, sementara kritik publik menempatkannya sebagai arena penyempitan demokrasi. ([Reuters](#))

Parlemen juga menjadi titik temu kepentingan ekonomi-politik yang kontroversial. International IDEA mencatat bahwa revisi UU Minerba pada Februari 2025 diprotes kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, terutama karena dikhawatirkan melemahkan tata kelola serta pengawasan lingkungan, dan karena muncul perdebatan tentang keterlibatan entitas yang terkait dengan kampus. Walau detail rancangan dan implementasi berubah dalam proses legislasi, kontroversi ini memperlihatkan bahwa parlemen tidak sekadar arena hukum, tetapi arena di mana batas antara pendidikan, bisnis, dan kekuasaan diperdebatkan. ([International IDEA](#))

Kritik terhadap parlemen makin tajam ketika isu tunjangan legislator memicu ledakan protes pada Agustus 2025. Reuters melaporkan bahwa demonstrasi itu bermula dari kemarahan terhadap tunjangan dan fasilitas anggota parlemen, lalu berkembang menjadi protes nasional terhadap prioritas belanja pemerintah, ketimpangan, dan elitisme politik. Dalam hal ini, parlemen tidak lagi dilihat publik semata sebagai lembaga perwakilan, tetapi sebagai simbol jarak antara elite dan warga. Jalan bergerak karena parlemen dipersepsikan bukan sebagai penyerap aspirasi, melainkan sebagai bagian dari problem representasi itu sendiri. ([Reuters](#))

Tetap saja, kekuatan parlemen tidak bisa diremehkan. Setelah revisi UU TNI disahkan, Mahkamah Konstitusi pada September 2025 menolak permohonan yang mempersoalkan cacat prosedural dalam proses legislasi tersebut. Putusan itu berarti bahwa meskipun jalan menolak dan kampus

memprotes, parlemen tetap mampu mempertahankan hasil politiknya melalui perlindungan prosedur formal. Di sinilah terlihat bahwa dalam politik Indonesia hari ini, parlemen masih menjadi arena keputusan final, meskipun legitimasi sosial keputusan itu bisa lemah. ([Reuters](#))

Interaksi Tiga Arena: Jalan, Kampus, dan Parlemen

Hubungan antara tiga arena ini paling jelas terlihat dalam krisis pilkada Agustus 2024. Parlemen bergerak cepat mencoba mengubah aturan yang dipandang publik bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kampus dan jaringan masyarakat sipil memberi bahasa normatif bagi perlawanan, sedangkan jalan mengubah perdebatan prosedural menjadi tekanan nasional. Hasilnya, parlemen mundur dan KPU menyesuaikan aturan. Kasus ini menunjukkan pola ideal bagi oposisi demokratis: kampus menyediakan legitimasi intelektual, jalan memproduksi biaya politik, dan parlemen dipaksa melakukan koreksi. ([Reuters](#))

Tetapi pola itu tidak selalu berulang. Dalam revisi UU TNI, kampus dan jalan aktif menolak, namun parlemen tetap meloloskan undang-undang. Mengapa? Karena isu ini menyentuh preferensi inti elite negara, didukung koalisi besar, dan dibingkai oleh parlemen sebagai kebutuhan pertahanan nasional. Kritik publik gagal menimbulkan biaya politik yang cukup untuk membatalkan keputusan. Dalam kasus seperti ini, tiga arena hadir, tetapi tidak seimbang: parlemen terlalu kuat, kampus dan jalan terlalu lemah untuk membalik hasil. ([Reuters](#))

Gerakan "Indonesia Gelap" menunjukkan pola ketiga: kampus dan jalan mampu membentuk wacana nasional, tetapi respons negara lebih banyak berupa janji administratif dan pernyataan bahwa tuntutan akan dipelajari. Reuters melaporkan bahwa pemerintah menyatakan pendidikan tidak akan terdampak, sementara demonstran tetap tidak yakin. Kasus ini memperlihatkan bahwa tidak semua protes diarahkan pada parlemen; sebagian diarahkan ke eksekutif dan kebijakan anggaran. Namun tetap

saja, ketika keluhan-keluhan itu kelak memerlukan perubahan hukum atau revisi APBN, parlemen kembali menjadi arena penentu. ([Reuters](#))

Gelombang protes 2025 terhadap tunjangan anggota parlemen memperlihatkan interaksi yang lebih rumit lagi. Jalan menekan keras dan berhasil memicu konsesi berupa pemotongan beberapa fasilitas legislator, tetapi eskalasi kekerasan justru menimbulkan krisis baru. Mahasiswa kemudian bertemu menteri, sebagian perwakilan juga bertemu anggota parlemen, dan pada Maret 2026 empat aktivis yang dituduh menghasut protes dibebaskan pengadilan. Ini menunjukkan rantai interaksi tiga arena: tuntutan lahir di jalan, diperkuat kampus, dinegosiasikan dengan pemerintah dan parlemen, lalu sebagian berakhir di pengadilan. Politik Indonesia hari ini, dengan demikian, bukan hanya soal siapa yang menang di satu arena, tetapi bagaimana konflik bermigrasi antararena. ([Reuters](#))

Demokrasi Indonesia dan Krisis Representasi

Bila dilihat secara lebih luas, dinamika tiga arena ini pada dasarnya mencerminkan krisis representasi. Parlemen secara formal mewakili rakyat, tetapi penurunan kepercayaan terhadap efektivitas parlemen dan maraknya protes menunjukkan bahwa banyak warga tidak merasa cukup terwakili oleh jalur formal. Kampus menjadi penting justru karena ia dianggap lebih bebas dari kompromi elite. Jalan menjadi penting karena ia memberi cara cepat untuk memaksa isu masuk ke agenda nasional. Dengan kata lain, semakin lemah fungsi representatif parlemen, semakin sering kampus dan jalan mengambil alih fungsi artikulasi politik. ([International IDEA](#))

Namun, dominasi jalan juga bukan jawaban ideal. Politik yang terlalu bergantung pada protes berisiko menjadi reaktif, episodik, dan mahal secara sosial. Kampus juga tidak selalu mampu menjaga kontinuitas gerakan; regenerasi cepat, fragmentasi organisasi, dan keterbatasan aliansi sering membuat energinya sulit dipertahankan. Sementara itu, parlemen tetap memiliki keunggulan institusional karena keputusan resminya

mengikat. Maka, problem utama demokrasi Indonesia bukan memilih salah satu dari tiga arena itu, melainkan bagaimana membuat ketiganya berhubungan secara lebih sehat: jalanan didengar tanpa harus meledak, kampus dihormati tanpa perlu disekuritisasi, dan parlemen dibuka tanpa harus dipaksa mundur oleh krisis.

Menuju Tata Politik yang Lebih Sehat

Pertama, parlemen perlu sungguh-sungguh memulihkan fungsi representatifnya. Itu berarti partisipasi publik dalam pembahasan undang-undang tidak boleh sekadar formalitas, dan kecepatan legislasi tidak boleh dibayar dengan minimnya deliberasi. Selama parlemen lebih terlihat sebagai mesin ratifikasi keputusan elite, jalanan akan terus menjadi arena koreksi utama. Penurunan indikator *effective parliament* yang dicatat International IDEA adalah peringatan serius bahwa masalah ini bukan persepsi sesaat, melainkan gejala institusional. ([International IDEA](#))

Kedua, kampus perlu mempertahankan otonomi moralnya sambil meningkatkan efektivitas politiknya. Temuan Ramadhan dan Aminuddin serta kritik Adhipermana menyiratkan bahwa gerakan mahasiswa akan lebih berpengaruh bila mampu menghubungkan idealisme kampus dengan aliansi sosial yang lebih luas, termasuk buruh, komunitas warga, kelompok HAM, dan media independen. Kampus yang hanya bersuara tanpa membangun jaringan akan mudah terdengar, tetapi sulit mengubah hasil. ([Jurnal Universitas Padjadjaran](#))

Ketiga, negara harus berhenti membaca protes sebagai ancaman keamanan semata. Pembebasan empat aktivis pada Maret 2026 memberi sinyal bahwa kriminalisasi gerakan tidak selalu berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Bila negara tetap mengandalkan penangkapan, kekerasan aparat, atau pembatasan ruang sipil, maka setiap konflik kebijakan akan cenderung bergerak dari deliberasi ke ledakan. Demokrasi yang matang justru memerlukan kapasitas mendengar ketidaksetujuan sebelum ia berubah menjadi kerusuhan. ([Reuters](#))

Keempat, ruang digital harus diperlakukan sebagai bagian dari politik demokratis, bukan sekadar objek kontrol. Studi tentang aktivisme digital pemuda menunjukkan bahwa media sosial sangat efektif mempercepat mobilisasi dan membangun identitas kolektif, tetapi juga rentan terhadap disinformasi dan kontra-mobilisasi. Karena itu, integrasi antara etika digital, literasi publik, dan perlindungan kebebasan berekspresi sangat penting bila kampus dan jalan ingin tetap menjadi penyeimbang parlemen, bukan korban manipulasi informasi.

Penutup

Jalan, kampus, dan parlemen adalah tiga arena yang bersama-sama membentuk politik Indonesia hari ini. Jalan memberi tekanan dan urgensi. Kampus memberi bahasa moral, kritik intelektual, dan kader gerakan. Parlemen memberi bentuk hukum dan keputusan final. Dalam praktiknya, ketiganya terus bertarung menentukan siapa yang berhak mendefinisikan kepentingan umum. Politik Indonesia kontemporer karena itu tidak bisa dibaca hanya dari dinamika elite atau angka pemilu, tetapi juga dari bagaimana demonstrasi muncul, bagaimana kampus bersuara, dan bagaimana parlemen merespons atau mengabaikan keduanya.

[\(International IDEA\)](#)

Pelajaran dari 2024 hingga Maret 2026 cukup jelas. Ada saat ketika jalan dan kampus berhasil memaksa koreksi parlemen, seperti pada krisis pilkada 2024. Ada saat ketika parlemen bertahan meski kampus dan jalan menolak, seperti pada revisi UU TNI. Ada pula saat ketika krisis representasi terhadap parlemen memicu ledakan yang begitu besar hingga berujung pada kematian, ribuan penangkapan, dan proses pengadilan panjang, seperti pada protes 2025. Ini semua menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih hidup, tetapi belum sepenuhnya sehat.

[\(Reuters\)](#)

Pada akhirnya, kualitas demokrasi Indonesia akan ditentukan oleh apakah tiga arena ini bisa dihubungkan kembali dalam logika yang lebih demokratis. Parlemen harus lebih mendengar sebelum dipaksa. Kampus harus tetap kritis tanpa kehilangan kemampuan beraliansi. Jalanan harus tetap diakui sebagai kanal politik yang sah, bukan sekadar masalah ketertiban. Bila ketiga arena itu saling menutup, Indonesia akan memiliki demokrasi yang bising tetapi rapuh. Bila ketiganya saling mengoreksi, Indonesia masih punya peluang menjaga demokrasi yang substantif. ([International IDEA](#))

Glosarium

Jalanan: arena politik nonformal tempat warga mengekspresikan tuntutan melalui demonstrasi, aksi simbolik, dan mobilisasi massa.

Kampus: arena sosial-politik yang mencakup mahasiswa, dosen, organisasi intra-kampus, dan komunitas akademik sebagai penghasil kritik, gagasan, dan kader gerakan.

Parlemen: lembaga perwakilan rakyat yang secara formal menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. ([DPR RI](#))

Moral force: doktrin yang menempatkan mahasiswa sebagai kekuatan moral penyeimbang kekuasaan, tetapi kadang membuat gerakan enggan membangun aliansi politik yang lebih luas.

Efektivitas parlemen: kemampuan parlemen menjalankan fungsi representasi, legislasi, pengawasan, dan deliberasi secara bermakna. ([International IDEA](#))

Obstructed civic space: kategori CIVICUS untuk ruang sipil yang menghadapi hambatan serius terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul damai, dan berserikat. ([Civics Monitor](#))

Aktivisme digital: penggunaan media sosial dan platform digital untuk mobilisasi, advokasi, pembentukan identitas kolektif, dan pengawasan kekuasaan.

Referensi (APA 7)

Adhipermana, L. D. (2022). *Indonesian student movement moral force doctrine in social change under Jokowi's Indonesia and its future*. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 1(1), 18–25.

Freedom House. (2025). *Freedom in the World 2025: Indonesia*.

Freedom House. (2026). *Freedom in the World 2026: Indonesia*.

International IDEA. (2025). *Indonesia country profile: The Global State of Democracy*.

International IDEA. (2025). *Indonesia—February 2025*.

Nugroho, B. H. (2025). *Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social movements*. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(10).

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Pemerintah Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.

Ramadhan, M. F. S., & Aminuddin, M. F. (2025). *Student activism in post-authoritarian Indonesia: Higher education reform, movement dynamics, and shifting political narratives*. *Jurnal Wacana Politik*, 10(3), 313–327.

Reuters. (2024, February 7). *Indonesian students demand president remain neutral ahead of poll.*

Reuters. (2024, February 12). *Indonesia students plan protest over alleged poll interference.*

Reuters. (2024, August 22). *Indonesia shelves plan to revise election law as protests rage.*

Reuters. (2024, August 24). *Indonesia election body gets approval to issue new rules in line with protesters.*

Reuters. (2025, February 20). *Students lead "Dark Indonesia" protests against budget cuts.*

Reuters. (2025, February 21). *Protesters extend "Dark Indonesia" rally against Prabowo's policies.*

Reuters. (2025, March 18). *Indonesia lawmakers set to pass amended bill allowing more military government posts.*

Reuters. (2025, March 20). *Indonesia parliament passes contentious amendments to military law.*

Reuters. (2025, August 31). *Deadly Indonesia protests force U-turn on lawmakers' perks.*

Reuters. (2025, September 3). *Indonesia fires officer involved in police killing as protests continue.*

Reuters. (2025, September 17). *Indonesia court finds no procedural flaws with law expanding military's role.*

Reuters. (2026, March 6). *Indonesian court acquits four activists accused of inciting deadly 2025 student protests.*

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 6 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d37f65-3640-839d-822b-a5e109ffd3e1>